



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	<b>18</b>	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## Dua Bulan, ASN DKI Jakarta WFH

Merespons masalah polusi udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada 21 Agustus-21 Oktober 2023.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau *work from home* selama dua bulan bagi aparatur sipil negara. Kebijakan diambil merespons isu polusi udara menjelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai memimpin upacara peringatan HUT Ke-78 RI di Plaza Selatan Monas, Kamis (17/8/2023), menyatakan, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak melakukan pelayanan secara langsung. Pelayanan langsung itu di antaranya petugas di rumah sakit umum daerah (RSUD), puskesmas, satuan polisi pamong praja, dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dinas perhubungan, dan pelayanan tingkat kelurahan.

Implementasinya, 50 persen ASN bekerja dari kantor dan 50 persen lainnya WFH. Kebijakan itu bakal berlaku pada 21 Agustus-21 Oktober 2023.

Sekretaris Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan, proporsi pegawai yang menjalankan WFH akan disesuaikan selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 4-7 September 2023. Pengaturannya, pegawai yang WFH 75 persen dan yang bekerja dari kantor 25 persen.

"Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dengan lokasi KTT

ASEAN, seperti kantor dinas pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan," katanya.

Setelah WFH selama dua bulan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengevaluasi efektivitasnya. "Kita lihat dulu, juga kita lihat kinerja PNS seperti apa," ujar Joko.

Adapun untuk perusahaan swasta, pelaksanaan sistem bekerja sebagian dari rumah dan sebagian dari kantor masih bersifat imbauan.

### Pembelajaran jarak jauh

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, selain WFH bagi ASN, Pemprov DKI juga berencana menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sistem PJJ diberlakukan dengan persentase kehadiran siswa 50 persen, sedangkan guru tetap hadir 100 persen.

"Untuk PJJ, hanya saat KTT ASEAN berlangsung. Sekolah yang menerapkan PJJ juga hanya di sekitar *venue* KTT ASEAN, seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng. Untuk sekolah yang jauh dari *venue* KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal, masuk 100 persen," tutur Sigit.

Meski kualitas udara belakangan terus memburuk, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, belum ada kenaikan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Hingga

Juni 2023, kasus ISPA di Jakarta sebanyak 638.291 kasus. Angka tertinggi tercatat pada Maret 2023, yakni 119.734 kasus, sempat turun pada Mei menjadi 99.130 kasus, lalu naik lagi menjadi 102.475 kasus pada Juni. Rata-rata kasus ISPA hingga pertengahan tahun 2023 sekitar 146.000 kasus per bulan.

Pola tersebut sama dengan keadaan sebelum pandemi Covid-19. Adapun pada 2020 dan 2021, atau saat Covid-19 merebak, angka kasus cenderung menurun.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, meluasnya penyakit akibat perburukan mutu udara sudah diantisipasi dengan menyiapkan fasilitas kesehatan di Jakarta. Sebanyak 196 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kecamatan, 31 RSUD, dan ratusan rumah sakit lainnya membuka layanan seluas-luasnya bagi warga.

"Data tentang penyakit yang berhubungan dengan kualitas udara tidak sehat, yaitu ISPA, pneumonia, asma, dan lainnya, untuk tahun 2023 trennya tidak berbeda dengan jumlah kasus sebelum pandemi. Pergerakan kasus masih relatif normal, belum ada peningkatan signifikan," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis.

Meski kasus ISPA di Jakarta belum meningkat signifikan, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. (HLN/RAP/KAT/TIK)